

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, identitas Universitas Hasanuddin, Makassar.
- . 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinata Media.
- . 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bibit Suprpto, 1985, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi dan Wiwin Suwandi, 2019, *Menteri Negara Dalam Sistem Presidensial*, Litera, Yogyakarta.
- . 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhani, 2018, *Presidential Threshold* "Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia", Setara Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2017, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang.
- Ganewati Wuryandari (dkk), 2008, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- H. Dahlan Thaib (dkk), 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Jhon J. Wuest dalam Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi hingga Reformasi*, Grafari Budi Utami., Jakarta.
- La Sina, 2015, *Hukum Tata Usaha Negara*, Totalmedia, Yogyakarta.

Margarito Kamis, 2014, *Kekuasaan Presiden Indonesia (Sejarah Kekuasaan Presiden sejak Merdeka hingga Reformasi Politik)*, Setara Press, Malang.

Mexasasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Budi Chaniago, Jakarta Selatan.

Ni'matul Huda, 2011, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

JURNAL

A Salman Maggalatung, "Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 2, Nomor 2, 2015.

Aly Yusuf, "Evaluasi Pemerintahan SBY-KALLA", *The Indonesian Institute*, Juni 2005.

Beverly Evangelista, "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut UUD 1945", *Jurnal IUS*, Vol 11, Nomor 5 Agustus 214.

Dian Kus Pratiwi (dkk), "Pengenalan Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah", *JAMALI*, Vol 1, Nomor 1 Maret 2019.

Fajlurrahman Jurdi, "Formasi Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial)", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25, Nomor 2, 2017.

Himawan Indrajat, "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi", *Jurnal Sosiologi*, Vol 18, 2016.

Insan Fahmi Siregar, "Dinamika Demokrasi Di Indonesia Masa orde Lama: Studi Kasus Antara Sukarno Versus Masyumi", *Paramita*, Vol. 21, Nomor 1 Januari 2011.

Josef Mario Monterio, "Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri Yang Menimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial Dan Teori Kewenangan", *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 39, Nomor 2 Agustus 2017.

Kaharuddin, Galang Asmara, Minollah dan Haeruman Jayadi, "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, Nomor 2, 2016.

- Lili Romli, "Koalisi Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi", *Jurnal Politica*, Vol 8, Nomor. 2, 2 November 2017.
- M. Jamhuri, "Analisis Yuridis Terhadap Hak Prerogatif Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945" *JOM Fakultas Hukum*, Vol 2, Nomor 2 Oktober 2015.
- Mei Susanto, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015", *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, Nomor 3, 2016.
- Mexasasai Indra, "Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, Nomor 2, 2014.
- Mikael Loi, "Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-JK", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 5, Nomor 1, 2016.
- Novira Maharani Sukma, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/puu-ix/2011", *Jurnal Law Reform*, Vol 8, Nomor 2, 2013.
- P Purwoko, "Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia Setelah Reformasi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Universitas Diponegoro, Vol 1. Nomor 2 September 2013.
- Putri Uswatun dan A Triyono, "Berita Perombakan atau Reshuffle Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jk (Analisis Framing Berita Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-Jk di Media Online Tempo.co edisi 06 Mei-13 Agustus 2015)", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Rifki Asrof (dkk), "KH. Abdurrahman Wahid, Kepemimpinan, dan Politik", *Artikel*, 5 Juli 2019.
- Rina Martina, "Politisasi Birokrasi di Indonesia", *POLITIKA Jurnal Ilmu Politik*, 2010.
- Rosdalina Bukido, "Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Ilmiah As-Syari'ah*, Vol 10, Nomor 1, 2012.
- Sukri Tamma dan Sakinah Nadir, "Koalisi Politik Di Indonesia Pasca Soeharto", *Jurnal Review Politik*, Vol 3, Nomor 2 Desember 2013.
- Wahyu Gunawan, "Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurist-Diction*, Universitas Arlangga, Vol. 1 Nomor 1 September 2018.

Wayu Eko Yudiatmaja, "Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 3, Nomor 1, 2015.

Yusuf Wibisono, "Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 40, Nomor 55, 2017.

Zulkarnain, "Ketatanegaraan Indonesia Pascakemerdekaan", *Jurnal Sejarah Ketatanegaraan*, Vol 1, Nomor 1, 2014.

SKRIPSI

Andi Muh. Irvan Alamsyah, 2018, *Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1959
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1960
Peraturan Presiden (Perpres) No. 47 Tahun 2009
Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2011